

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. SiLPA pada tahun anggaran 2013-2015 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu SiLPA tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 11% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 88.404.158.097, selanjutnya SiLPA pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 50,8% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 133.316.691 dan pada tahun 2015 SiLPA Kota Kupang terus mengalami peningkatan sebesar 12,3% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 149.783.562.272.
2. Penerimaan piutang daerah tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun Pada tahun 2013 anggaran penerimaan piutang daerah yang ditetapkan sebesar Rp 438.979.300 namun realisasinya sebesar Rp 510.649.694, selanjutnya pada tahun 2014 anggaranya sebesar Rp 93.500.100 dan realisasinya sebesar Rp 93.500.100 dan pada tahun 2015 tidak ada anggaran yang ditetapkan namun ada realisasi yang terjadi yaitu sebesar Rp 101.798.000. Hal ini disebabkan karena masyarakat sering menunggak pembayaran pinjaman yang diberikan sehingga penerimaan piutang sering mengalami naik turun.
3. Investasi pada tahun anggaran 2013-2015 mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah investasi sebesar Rp 12.000.000.000 yang diperoleh dari PDAM dan

Bank NTT, selanjutnya pada tahun 2014 jumlah investasi sebesar Rp 15.000.000.000 yang diperoleh dari PDAM, Bank NTT, dan PD Sasando, selanjutnya pada tahun 2015 jumlah investasi mengalami penurunan menjadi Rp 12.500.000.000 yang di dapat dari PDAM dan Bank NTT.

6.2 Saran

1. Dilihat dari SiLPA yang terus meningkat dari tahun ke tahun pemerintah sebaiknya tidak perlu melakukan penghematan dana, sehingga dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik dan kegiatan dan belanja pemerintah dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Pemerintah perlu memperhatikan pengembalian piutang daerah sehingga pengembalian piutang selalu terealisasi dengan baik dan tidak terjadinya tunggakan pada tahun yang sudah dianggarkan.
3. Pemerintah perlu menaikkan jumlah investasi yang ada pada tiap-tiap BUMD yang ada di Kota Kupang karena dilihat dari pembiayaan neto atau selisi antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang cukup besar sehingga dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

DARTAR PUSTAKA

- Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi.2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim Abdul dan Muhamad Iqbal.2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ketiga*. Salemba Empat : Jakarta
- Halim Abdul.2004. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Jusup, Al Hariono.2001. *Dasar-Dasar Akuntansi Edisi Keenam*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mahmudi.2011. *Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Salemba Empat : Jakarta
- Mulyadi.2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba empat : Jakarta.
- Mulyadi.2009. *Akuntansi Biaya Edisi Kelima*. UPP-STIM YKPN : Yogyakarta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahmawati Dewi dan Rita I.M. Sulistiyo. 2016. *Analisis Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jurnal Emba : Surakarta
- Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.